

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692039/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
- Sebesar : Rp. 9.716.571.000 (SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.880.864.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	4.835.707.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 9.716.571.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

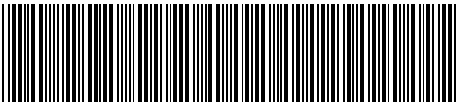
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025

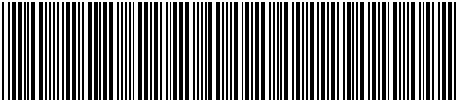


DS:6703-0136-9399-8952

Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.618.500.000
BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	2.618.500.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	7.098.071.000
WA.7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp.	7.098.071.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
I A. INFORMASI KINERJA



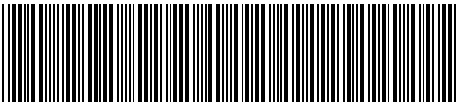
DS:6703-0136-9399-8952

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.618.500.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.618.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
	:	2. 01	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
	:	3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5,00	layanan	2.618.500.000
Rincian Output	:	01	BAH.002 Layanan Balai Harta Peninggalan	5.00	layanan	2.618.500.000
Program	:	135.04.WA	Program Dukungan Manajemen			7.098.071.000
Kegiatan	:	7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP			7.098.071.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP			
	:	2. 02	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.726.251.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	9.075.000
	:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	214.050.000
	:	03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	622.262.000
	:	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	4.880.864.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7113.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	64,00	Unit, m2, Paket	655.376.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	64.00	Unit	655.376.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
I A. INFORMASI KINERJA

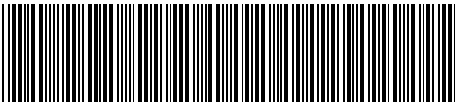


DS:6703-0136-9399-8952

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

Klasifikasi Rincian Output	3	:	7113.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	34,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	669.427.000
Rincian Output		:	01	EBC.001 Layanan Pengelolaan SDM	1.00	Layanan	650.868.000
		:	02	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	33.00	Orang	18.559.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	47.017.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	810.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	23.850.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Laporan	10.590.000
		:	04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Laporan	6.511.000
		:	05	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	5.256.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
I B. SUMBER DANA



DS:6703-0136-9399-8952

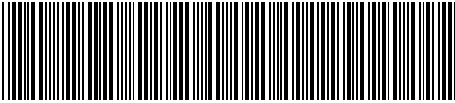
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	9.716.571.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	4.880.864.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	4.835.707.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



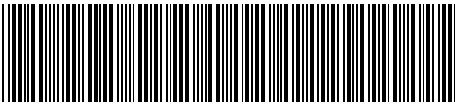
DS:6703-0136-9399-8952

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692039	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	2.494.713	6.566.482	655.376	-	-	9.716.571	01 . 51 139@ 139 139@ 01 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.618.500	-	-	-	2.618.500		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.618.500	-	-	-	2.618.500		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.618.500	-	-	-	2.618.500		
04	PNBP	-	2.618.500	-	-	-	2.618.500		
135.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.494.713	3.947.982	655.376	-	-	7.098.071		
7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	2.494.713	3.947.982	655.376	-	-	7.098.071		
7113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	2.494.713	3.231.538	-	-	-	5.726.251		
01	RM	2.494.713	2.386.151	-	-	-	4.880.864		
04	PNBP	-	845.387	-	-	-	845.387		
7113.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	655.376	-	-	655.376		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6703-0136-9399-8952

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
Kewenangan : (KD)

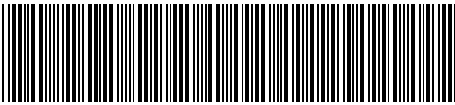
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10
04 PNB		-	-	655.376	-	-	655.376	139	
7113.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	669.427	-	-	-	669.427	01 . 51	
04 PNB		-	669.427	-	-	-	669.427	139@	
7113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	47.017	-	-	-	47.017	01 . 51	
04 PNB		-	47.017	-	-	-	47.017	139@	
JUMLAH		2.494.713	6.566.482	655.376	-	-	9.716.571		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6703-0136-9399-8952

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (692039) BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

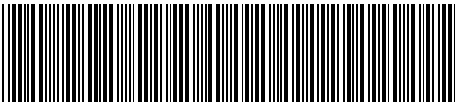
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692039	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	169.724	724.329	1.180.226	769.931	1.332.011	964.882	795.578	928.329	1.015.465	621.047	546.628	668.421	9.716.571
		BELANJA PEGAWAI	154.209	182.639	335.437	182.639	182.639	335.437	182.639	182.639	182.639	182.639	182.639	208.518	2.494.713
		BELANJA BARANG	15.515	486.190	782.414	429.151	1.140.672	620.245	565.839	688.830	632.826	380.908	363.989	459.903	6.566.482
		BELANJA MODAL	0	55.500	62.375	158.141	8.700	9.200	47.100	56.860	200.000	57.500	0	0	655.376
		135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	212.527	189.758	175.984	786.686	204.899	212.599	269.433	232.032	116.128	124.511	93.943	2.618.500
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	212.527	189.758	175.984	786.686	204.899	212.599	269.433	232.032	116.128	124.511	93.943	2.618.500
		135.04.WA.7113 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	169.724	511.802	990.468	593.947	545.325	759.983	582.979	658.896	783.433	504.919	422.117	574.478	7.098.071
		51 BELANJA PEGAWAI	154.209	182.639	335.437	182.639	182.639	335.437	182.639	182.639	182.639	182.639	182.639	208.518	2.494.713
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	15.515	273.663	592.656	253.167	353.986	415.346	353.240	419.397	400.794	264.780	239.478	365.960	3.947.982
		53 BELANJA MODAL	0	55.500	62.375	158.141	8.700	9.200	47.100	56.860	200.000	57.500	0	0	655.376

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
IV A. B L O K I R



DS:6703-0136-9399-8952

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692039] BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

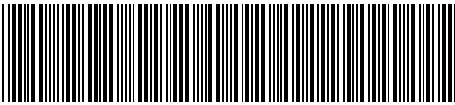
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692039	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.205.438	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.205.438	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 510
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	7113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 738.644		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.590
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.140		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 342.533		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
135.04.WA	Program Dukungan Manajemen		
7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP		
7113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.496		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7113.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.525		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692039/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6703-0136-9399-8952

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692039] BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO